

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HARTA
BENDA KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi Kasus Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam
Ilmu Hukum Keluarga**



Oleh:

Jainatus Shela Almadia

132111099

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291

Semarang 50185

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian ini skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2017



Jainatus Shela Almadia
132111099



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Jainatus Shela Almadia
NIM : 132111099
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN HARTA BENDA KEPADA ANAK
ANGKAT (Studi Kasus Desa Pandanarum Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal 20 Juli 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 20 Juli 2017

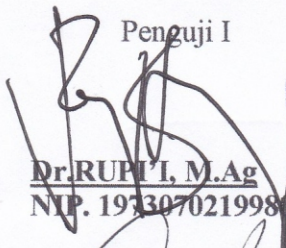
Dewan Penguji

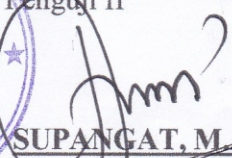
Ketua Sidang

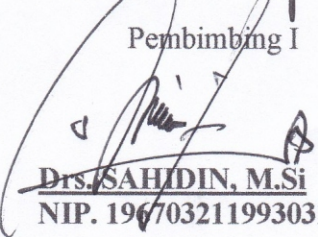
Sekretaris Sidang



H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag, M.H
NIP. 197111012006041003


Penguji I
Dr. RUPU, M.Ag
NIP. 193307021998031002


Penguji II
SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004


Pembimbing I
Drs. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005


Pembimbing II
MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., MH.
NIP. 197111012006041003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Jainatus Shela Almadia

NIM : 132111099

Jurusan : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

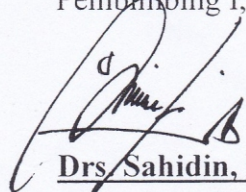
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2017

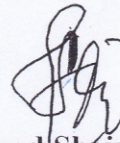
Pembimbing I,

Pembimbing II



Drs. Sahidin, M.si

NIP. 19670321 199303 1 005



Muhammad Shroim, S.Ag., MH.

NIP. 19711101 200604 003

MOTTO

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ

ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang aku cintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya:

1. Yang tersayang Ibu Riskiyah, S.Pd yang selalu mendoakanku, penyemangatku dan menjadi motivator.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Sahidin, M.Si dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H yang telah bersedia membimbing dan menasihati.
3. Adik-adikku tercinta Khoirul Umam Muharom, Nadhifatur Rosyada dan Fitrotul Aida yang selalu setia menanti kesuksesanku.
4. Saudara sepupuku Yasir Ali, S.Pd yang selalu menjadi motivator
5. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang terkhusus Khaerunnisa, Muslikhatun Nadia, Hazian Aulia Magnesi dan Indana Zulfa Zumaro.
6. Teman-teman senasib seperjuangan ASC angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
7. Teman-temanku TIM PPL KUA Mijen Semarang, Pengadilan Negeri Demak dan Pengadilan Agama Demak Angkatan 2013.
8. Teman-temanku TIM Kuliah Kerja Nyata Ke-67 UIN Walisongo Semarang terkhusus Posko 32 Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.

9. Teman-temanku Kos An-Nur terkhusus Faizah Intan Putri yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Kepada bapak ibu dosen serta guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.

ABSTRAK

Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk diwarisi ahli warisnya. Hak seseorang pun tidak muncul secara tiba-tiba tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang meninggal dunia. Dalam hal pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sangat berbeda dengan hukum Islam, yaitu praktek pelaksanaan dengan cara anak angkat bisa mendapatkan harta dari keluarga angkatnya dan mendapat bagian melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat tiga permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, khususnya keluarga Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan harta benda kepada anak angkat. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa surat keterangan dari kepala desa tentang anak angkat yang mendapatkan harta.

Hasil yang diperoleh antara lain menyebutkan bahwa: *pertama* praktek pelaksanaan harta benda bahwa anak angkat mendapatkan harta bersama dan ahli waris mendapatkan harta bawaan, pembagian harta benda dilakukan atas dasar kesepakatan dan musyawarah. *Kedua*: faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda disebabkan masalah perekonomian, belas kasihan, dan menjaga kerukunan keluarga. *Ketiga*: tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaannya terdapat perbedaan berdasarkan hukum Islam dengan praktek pelaksanaan harta benda di daerah tersebut. Antara lain pada proses pelaksanaan dan juga bagian yang diperoleh anak angkat. Namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Karena ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan cara pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam. dengan memperhatikan kaidah *Ushul Fiqih Al-Hukmu yaduru ma'a 'illati wujudan wa 'adaman* yang menunjukkan bahwa alasan itu sangat mempengaruhi hukum.

Kata kunci: *harta benda, anak angkat.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Berkat limpahan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya serta usaha sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN). Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktek pembagian harta waris di Desa Pandanarum menurut hukum Islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Drs. Sahidin, M.Si dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis
4. Para dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini
6. Bapak dan Ibu, adik-adik beserta segenap keluarga atas do'a, dukungan, perhatian, arahan dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dan do'a semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Amin

Penulis menyadari semua bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap semoga

hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 11 Juli 2017

Jainatus Shela Almadia
132111099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II KEWARISAN DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	22
B. Rukun dan Syarat Kewarisan	30
C. Asas-asas Kewarisan Islam	31
D. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Warisan	34

E. Golongan Ahli Waris	38
F. Anak Angkat dalam Hukum Islam	42
G. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Waris, Wasiat Wajibah dan Hibah	44

BAB III DESKRIPTIF PELAKSANAAN HARTA BENDA KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	49
B. Praktek Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	50
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HARTA BENDA KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Praktek Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	61
B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	63

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah mensyari'atkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain Hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.¹

Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an adalah hukum kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas. Sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi.

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris

¹ Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995, h. 1

harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.²

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.³

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan wala' dan adanya tujuan Islam yaitu *baitul al-mall* yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan harta warisan sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.⁴

Dengan demikian jelaslah, bahwa siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentu jumlah harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, telah ditentukan secara limitatif oleh Allah Swt dan manusia tidak dibenarkan untuk

² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rsdakarya, 2007, h. 1

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009, h. 32

⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Persada Media Group, 2011, h. 17-18

ikut campur. Pengaturan hukum kewarisan Islam ini bersifat memaksa. Setiap muslim diwajibkan menaati hukum Allah Swt dan melaksanakannya termasuk ibadah.⁵

Berdasarkan ketentuan diatas dalam Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab, dan keturunan.⁶ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni apabila bukan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.⁷

Pengangkatan anak secara *tabbani* ini pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw. Pada waktu itu seorang budak yang dihadiahkan oleh istrinya Siti Khadijah untuk merawat beliau, bernama Zaid bin Haritsah. Karena sayangnya kepada anak itu beliau angkat anak dan hal ini diketahui oleh Nabi Muhammad Saw. Kita dipanggilkan Zaid bin Muhammad.

Atas tindakan tersebut, lalu turunlah ayat Al-Quran yang melarang pengangkatan anak yang demikian, dalam Al-Quran Surah Al-ahzab ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ أَعْلَمُ

⁵ Rachmadi, Usman, *op.cit.*, h. 34-35

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 192

⁷ Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 178

يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ ؕ وَلٰكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁸

Maksud dari ayat 4 sampai ayat 5 surah Al-ahzab jelaslah bahwa Hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah (keturunan) antara anak dan orang tuanya dan keluarganya atau menimbulkan hubungan darah (keturunan) antara anak dan orang tua angkatnya. Secara tegas berdasarkan ayat 4 sampai 5 surah al-ahzab tersebut, Allah melarang kita untuk memanggil nama anak-anak angkat tersebut dengan diikuti oleh nama-nama selain daripada nama ayah-ayah mereka.⁹

Oleh karena itu ayah angkat tidak menjadi wali nikah dan tidak ada suatu halangan bagi anak angkatnya untuk menikah dengan anak kandung

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2013, h. 41

⁹ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, h. 43-44

orang tua angkatnya atau dengan orang tua angkatnya sekalipun. Demikian pula antara anak dan orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai hak saling mewarisi.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa anak angkat tidak bisa saling mewarisi. Akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat seorang anak angkat bisa mendapatkan harta dari kedua orang tua yang mengangkatnya. Hal ini terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, keluarga yang berada di Desa tersebut bernama H.Darsan dan Hj. Temuwiyah. Mereka mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Danumi, kemudian anak tersebut tinggal bersama keluarga angkatnya sampai orang tua angkatnya meninggal dunia.

Setelah H.Darsan dan Hj. Temuwiyah meninggal dunia, mereka meninggalkan anak angkat, ahli waris dan harta benda. Harta benda yang ditinggalkan diantaranya harta bawaan dari Hj.Temuwiyah dan harta bersama dari H.Darsan dan Hj. Temuwiyah. Untuk harta bawaan dari Hj.Temuwiyah berupa sawah 500 M² dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000, tanah rumah dengan taksiran harga sejumlah Rp. 150.000.000 dan kebun 140 M² dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari keseluruhan harta bawaan dari Hj.Temuwiyah yaitu berjumlah Rp. 256.000.000 dan harta bersama dari H.Darsan dan Hj.Temuwiyah berupa sawah 1000 M² dengan taksiran harga berjumlah Rp. 152.000.000 dan kebun 280 M² dengan taksiran

¹⁰ Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 179

harga berjumlah Rp. 60.000.000 dari keseluruhan harta bersama tersebut berjumlah Rp.212.000.000.¹¹

Dalam pelaksanaan harta tersebut H.Basari (saudara dari Hj.Temuwiyah) meminta kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris.

Dari hasil pelaksanaan harta benda tersebut harta bawaan dari Hj. Temuwiyah diberikan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup dan harta bersama yang berupa sawah 1000 M² taksiran harga sebesar Rp.152.000.000 dan kebun 280 M² dengan taksiran harga sebesar Rp.60.000.0000 dari harta bersama tersebut berjumlah Rp.212.000.000 semuanya diberikan kepada Danumi selaku anak angkat, karena mengingat H.Darsan dan Hj. Temuwiyah hanya memiliki anak satu-satunya walaupun anak tersebut hanya berstatus anak angkat, anak angkat yang ditinggalkan oleh pewaris juga sudah lama mengurus keluarga angkatnya dan anak angkat tersebut belum mempunyai kehidupan yang layak seperti saudara dari Ibu Hj.Temuwiyah.¹²

Dalam kasus diatas, tampak adanya perbedaan berdasarkan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam anak angkat bukan termasuk ahli waris dan pemberian untuk anak angkat adalah dengan jalan pemberian wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta benda orang tua angkatnya.

¹¹ Agus Subandrio, wawancara, Pekalongan, 29 November 2016

¹² H.Basari, wawancara, Pekalongan, 29 November 2016

Sebagaimana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: *“terhadap anak angkat yang menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*.¹³ Akan tetapi dalam kenyataan yang ada pada kasus diatas, anak angkat bisa mendapatkan harta dan pendapatannya lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yang dijawab, yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op.cit.*, h. 78

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Agar penulisan ini berguna untuk mengurangi adanya penyimpangan pembagian harta benda.
 - c. Untuk memberikan gambaran terhadap praktek pelaksanaan harta benda di Desa Pandanarum Tirto Kecamatan Tirto.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai perkara kewarisan yang menjadi bagian dari materi hukum perdata di Indonesia telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana muslim, terlebih lagi dalam hubungannya dengan kewarisan Islam. Penelitian

kalangan sarana yang menulis status tentang kewarisan anak angkat masih dianggap minim. Sepanjang penelusuran penulis, baru mendapatkan beberapa penelitian yang memusatkan tentang masalah kewarisan, antara lain:

1. Skripsi karya Hikmatul Mafiyah (110710101115) mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember dengan judul *Pewarisan terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*. Hasil penelitiannya bahwa hukum adat di sebut sebagai “air dari dua sumber” sebab disamping sebagai ahli waris orang tua kandungnya. Ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Dikalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat diberkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.¹⁴
2. Skripsi karya Alfun Ni'matul Husna (03360200) mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul *Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa dalam hukum Islam status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga dia tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, meskipun demikian anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua

¹⁴<http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73432/110710101115--HIKMATUL%20MAHFIYYAH-1-74.pdf?sequence=1> dikutip pada tanggal 07 Desember 2016 Pukul 08.00 WIB

angkatnya. sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁵

3. Skripsi karya Siti Nur Azizah (2102156) mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*. Hasil penelitiannya bahwa tradisi sedulur sikep lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka tidak mengenal metode hijab dan mahjub, tidak ada perbedaan antara pembagian antara laki-laki dan perempuan, anak yang sudah keluar dari samin tetap mendapat warisan, begitu juga kepada anak angkat. Sedulur sikep mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia yang bukan dari keluarga pewaris bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan.¹⁶
4. Jurnal Sasi Vol 17 No.3 2011 karya Jean K Matuankota dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*. Hasil penelitiannya adalah dalam persoalan pengangkatan anak harus jelas di

¹⁵ <http://digilib.uin-suka.ac.id/953/2/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DP.pdf> dikutip pada tanggal 06 Desember 2016 Pukul 19.00 WIB

¹⁶ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/86/jtptiain-gdl-sitinurazi-4299-1skripsi-p.pdf> dikutip pada tanggal 05 Desember 2016 Pukul 20.00 WIB

pengadilan agar status anak mendapat perlindungan hukum dan bisa saling mewarisi antar keluarga angkatnya.¹⁷

5. Jurnal Al-Syir'ah vol.4 No.2 2006 karya Ridwan Jamal dengan judul *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Hasil penelitiannya adalah bahwa menurut hukum Islam penamaan anak angkat tidak dijadikan sebagai sebab mewarisi, karena prinsip dasar mewarisi adalah hubungan darah. Menurut hukum perdata apabila anak angkat tersebut sudah di putus oleh pengadilan maka anak angkat berhak mendapatkan warisan, dan menurut hukum adat bahwa pembagian harta waris sesuai dengan adatnya masing-masing.¹⁸
6. Jurnal Ahkam vol. 16 Nomor 1, April 2014 Karya Neni Nuraeni dengan judul *Tafsir Ayat Ahkam (Kajian tentang Bagian Waris dan Kepemimpinan Perempuan)*. Hasil penelitiannya adalah secara historis-sosiologis ayat-ayat waris merupakan bentuk penyadaran kemanusiaan bahwa perempuan sebagaimana laki-laki berhak mempunyai harta baik melalui warisan, wasiat, mas kawin dan nafkah, mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik terdapat dua pendapat yaitu ada ulama yang melarang dan ada ulama yang membolehkan.¹⁹

¹⁷ Jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf dikutip pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 10.16 WIB

¹⁸ 203-355-1SM.pdf dikutip pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.13 WIB

¹⁹ 624-1037-1-SM,Pdf, dikutip pada tanggal 6 April 2017 Pukul 23.16 WIB

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁰ Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum atau premis mayor.

Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar membenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 20-

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena.²¹ Dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²²

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang

²¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h.132

²² *Ibid.*, h. 106

langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,²⁴ yang mengambil lokasi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan objek kajian adalah pada permasalahan pelaksanaan pemberian harta benda kepada anak angkat, faktor-faktor yang mempengaruhi serta tujuan dengan adanya pemberian harta tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²⁵ yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-

²³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62

²⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 53

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 141

undangan, putusan pengadilan dan traktat.²⁶ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Surat Keterangan mendapat harta, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line).²⁷ Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu laporan penelitian Dosen IAIN Walisongo Semarang karya Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag yang berjudul *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.368/K/AG/1995)* dan laporan penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang karya Noor Aflah yang berjudul *Kewarisan Istri Beda Agama (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.16/AG/2010)*.

c. Bahan tersier

²⁶ Burhan Ashshofa, *op.cit*, h. 58

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit* h. 155

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus, buku pegangan.²⁸ Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan oleh penulis yaitu buku karya Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan yang berjudul *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, buku karya Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqh Mawaris*, buku karya Irma Devita Purnamasari yang berjudul *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, karya A Turmudi yang berjudul *Fiqh Waris di Indonesia* dan Musthofa Haffas yang berjudul *Hukum Waris Islam*.

4. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁸ Burhan Ashshofa, *loc.cit.*

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan anak angkat, ahli waris dari H. Darsan dan Ibu Hj. Temuwiyah, dari pihak pemerintah desa dan tokoh agama.

b. Observasi

Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat, waktu dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi (*non participant observer*) yaitu dimana observer tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus langsung terjun ke lapangan.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 72

³⁰ Burhan Ashshofa, *loc.cit*.

³¹ <http://akbar-iskandar.blogspot.co.id/2011/05/jenis-observasipartisipannon04.html?m=1> dikutip pada tanggal 10 April 2017 pukul 23:31 WIB

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³²

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa surat keterangan dari Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang anak angkat yang mendapatkan harta.

5. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.³³ Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010, h. 274

³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 200

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplai Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/*guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap displai data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 349-350

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai kewarisan dan anak angkat dalam Hukum Islam. Bab ini meliputi: pengertian dan dasar Hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan harta warisan, golongan ahli waris, anak angkat, pendapat ulama tentang kedudukan anak angkat dalam waris, wasiat dan hibah.

Bab ketiga mengenai Dekriptif terhadap pembagian harta waris kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Bab ini meliputi: Gambaran umum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Praktik pembagian harta waris kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat: Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Bab ini meliputi : Analisis praktik pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Analisis tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan harta

benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab Kelima Bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

BAB II

KEWARISAN DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam hukum Islam, waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab يرث-ارثا ورث yang berarti mewarisi.³⁵ Menurut istilah, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁶

Orang yang meninggalkan harta disebut *muwaris*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *waris*.³⁷

Menurut Habiburrahman, kewarisan (*al-miras*) yang disebut juga sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash-nash baik al-Qur'an dan al-Hadis.³⁸

Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *Faridhah* yang diambil dari kata *Fardh* bagian yang telah

³⁵ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, h. 1655

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 13

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 5

³⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 16

ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraidh.³⁹

Pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan sesuatu, baik berupa harta maupun hak-hak, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan syari'at.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam didasarkan kepada *Al-Qur'an*, *al-Hadis*, *Ijma'* dan *Ijtihad*.

a. Al-Qur'an

Hukum kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an, yang mengatur secara tegas maupun secara tersirat. Untuk jelasnya akan dikemukakan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu:⁴¹

1) QS.an-nisa (4): 7

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 291

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2013, h. 51

⁴¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada media Group, 2016, h. 10

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁴²

Ayat ini dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa kerabat *dzawil arhaam* juga memiliki hak mendapatkan bagian warisan, karena bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu dan cucu dari jalur anak perempuan termasuk kerabat. Oleh karena itu, mereka juga berhak mendapatkan warisan seperti yang ditetapkan oleh ayat وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ.⁴³

2) QS.an-nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2013, h. 78

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* jilid 2, Depok: Gema Insani, 2013, h. 605

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁴

Menurut mayoritas ulama ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian satu laki-laki adalah dua kali lipat bagian satu perempuan atau dengan kata lain sama dengan bagian dua perempuan. Apabila anaknya hanya satu perempuan saja, maka ia mendapatkan bagian setengah, namun jika dua perempuan atau lebih maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga. Jika anaknya hanya satu anak laki-laki lebih dari satu, maka harta pusaka yang ada dibagi sama antara mereka.⁴⁵

3) QS.an-nisa (4): 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ

⁴⁴ Departemen Agama RI, *loc.cit.*,

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 613-614

دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁴⁶

Ayat ini adalah mengatur tentang ketetapan dari perolehan masing-masing duda dan dua garis hukum, dan janda dengan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 79

dua garis hukum begitu pula terhadap perolehan saudara-saudara (*kalalah*) serta persoalan wasiat dan utang.

4) QS. Al-ahzab (33): 6

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴿٦﴾

Artinya: “....dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)”....⁴⁷

Yang dimaksud *وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ* (*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)*). Yang dimaksud *وَأُولُوا الْأَرْحَامِ* dengan adalah kerabat yakni mereka itu lebih berhak satu sama lain dalam hal pewarisan (waris mewarisi).⁴⁸

Dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan pembagian warisan agar diusahakan yang lebih dekat dengan pewaris. Namun demikian, Allah Swt tetap menganjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama mukmin dan muhajirin dengan cara memberikan sebagian harta benda mereka, antara lain melalui wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, h. 418

⁴⁸ Imam Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2012, h. 9-10

⁴⁹ Syamsulbahri Salihima, *op.cit*, h. 36

b. Al-Hadits

Sumber kedua dalam hukum kewarisan Islam adalah hadis. Dalam uraian ini, akan dikemukakan hadits-hadits pokok antara lain:⁵⁰

1) Hadis Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّزَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (زواه مسلم)⁵¹

Artinya: “Telah bercerita kepadaku ‘Abdul A’la bin Hammad (Imam Tirmizi), telah bercerita kepadaku wahaib dari Ibnu Thuwais, Dari ayahnya, Dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah Saw bersabda: serahkanlah harta waris kepada yang berhak sisanya untuk orang laki-laki yang ashabah (HR. Muslim)

2) Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لَابْنِ رَافِعٍ) (قَالَ إِسْحَقُ : حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه مسلم)⁵²

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ dan Abdul bin Humaid (dengan lafad Ibnu Rafi’). Ishaq berkata: telah bercerita kepadaku: telah mengabarkan kepadaku Mu’ammarr dari Ibnu Thowus dari ayahnya. Dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah Saw bersabda: bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashhabul furuudh) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (ashabah).

⁵⁰ *Ibid.*, h. 38

⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Kutub: Al-‘ilmiah, h. 560

⁵² Imam Muslim, *op.cit.*, h. 562

Kedua hadis tersebut, menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.⁵³

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum *syara*.⁵⁴ Sedangkan yang dimaksud *ijma'* disini adalah kesepakatan kaum muslimin untuk menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam *Al-quran dan Hadits* sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. *Ijma'* sendiri merupakan salah satu dalil *syara'* dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumhur ulama' fikih dianggap sebagai sumber Hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadis.⁵⁵

d. Ijtihad

Ijtihad yakni menggunakan segala kesanggupan untuk mencapai suatu putusan *syara'* (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam *al-Qur'an* dan *hadis*.⁵⁶ Ijtihad dalam hal ini merupakan pemikiran sahabat atau ulama' yang

⁵³ Syamsulbahri Salihima, *op.cit.*, h. 38-39

⁵⁴ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 220

⁵⁵ Rustam Dahar Apollo Harahap, *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2013, h. 36

⁵⁶ Abu Rokhmad, *op.cit.*, h. 166

memiliki syarat dan kriteria sebagai *mujtahid* untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk persoalan waris.⁵⁷

B. Rukun dan Syarat Kewarisan

Disamping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari halangan kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratn kewarisan. Adapun rukun kewarisan ada tiga yaitu:⁵⁸

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris
- 2) Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan (*wala*)
- 3) Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁵⁹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara *haqiqi*, *hukmi* atau *taqdiri* berdasarkan perkiraan.
 - a. *Mati Haqiqi* (mati sejati)
Mati haqiqi (mati sejati) adalah matinya *muwaris* yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim karena kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang nyata dan jelas.
 - b. *Mati Hukmi* (menurut putusan hakim)
Mati hukmi (putusan hakim) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup.

⁵⁷ Rustam Dahar Apollo Harahap, *op.cit.*, h. 36-37

⁵⁸ A Turmudi, *Fiqh Waris*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 39

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, cet ke 1,

c. *Mati Taqdiry* (menurut dugaan)

Mati taqdiry (dugaan) adalah sebuah kematian berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁶⁰

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, kalau sudah meninggalkan tempat selama 4 tahun dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang, maka sudah dapat dinyatakan telah meninggal dunia. Namun para ulama madzhab lain hal tersebut menyerahkan kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa macam kemungkinan.

- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal. Dengan demikian, apabila ada dua orang yang saling mewaris dan mereka meninggal bersama-sama ataupun meninggal secara berturut-turut akan tetapi tidak diketahui siapakah yang meninggal terlebih dahulu, maka kepada mereka tidak terjadi saling mewarisi.⁶¹
- 3) Harta peninggalan *muwaris* setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.⁶²

C. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas adalah pikiran dasar yang merupakan latar belakang dari peraturan konkret dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum

⁶⁰ Noor Aflah, *Kewarisan Istri Beda Agama*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014, h. 40-41

⁶¹ Rustam Dahar Apollo Harahap, *op.cit.*, h. 42

⁶² Noor Aflah, *op.cit.*, h. 42

dari peraturan konkret.⁶³ sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Sistem kewarisan Islam dalam hal ini antara lain:

1. Asas *Ijbari* (asas yang berlaku pada dirinya sendiri)

Asas ini mengatur bahwa pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a) Peralihan harta

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal beralih dengan sendirinya setelah kematian pewaris.

b) Segi jumlah

Bagian ahli waris dalam pewarisan sudah jelas ditentukan oleh Allah sehingga pewaris maupun ahli waris terikat kepada apa yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kewenangan untuk menambah atau mengurangnya.

c) Segi penerima peralihan harta

⁶³ Destri Budi Nugrahaeni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. H. 16

Yang berhak atas harta peninggalan sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada suatu kekhususan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli waris.

2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti

Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

3. Asas Individual

Asas ini mengatur bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam *ushul fiqih* disebut *ahliyat al-wujub*, sehingga setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak melakukannya.

4. Asas keadilan berimbang

Pembagian harta waris dilakukan dengan perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Hukum waris Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikul masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hakikat harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris merupakan lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima masing-masing terhadap keluarga seperti laki-laki menjadi penanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

5. Asas waris karena kematian

Peralihan hak materil maupun imateril dari seseorang kepada kerabatnya secara waris-mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.⁶⁴

D. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Warisan

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam ada yang menyebabkan sehingga antara satu orang dan orang lain dapat saling mewarisi. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya saling mewarisi sesuai hukum kewarisan Islam yaitu sebagai berikut:

1) Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan dikatakan sah menurut syari'at Islam, perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai syariat Islam. sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan yang maksudnya bahwa: perkawinan yang dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang kedua mempelai anut.

⁶⁴ Destri Budi Nugrahaeni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. H. 16-18

Perkawinan merupakan akad yang sah sesuai syariat, walaupun hubungan intim (*khulwah*) belum dilakukan dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras.

Apabila salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia yang perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau talak *raj'i* yang masih dalam masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam *QS.an-Nisa* (4):12 yaitu:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢ ﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah di penuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶⁵

Dengan demikian antara suami dan istri dapat saling mewarisi selama tidak ada hal-hal lain yang dapat menghalangi, yakni mereka adalah suami yang istrinya meninggal dan istri yang suaminya meninggal. Sebab mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat Islam, meskipun belum berhubungan intim. Jadi perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh.

2) Kekerabatan

Kekerabatan adalah antara satu orang dengan orang lain mempunyai hubungan darah baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah, serta pertalian darah menyamping. Terjadinya waris mewarisi karena hubungan kekerabatan disebutkan Firman Allah Swt dalam QS.*an-nisa* (4):7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

⁶⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 79

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁶⁶

Adapun golongan lurus ke atas disebut *ushul* atau *leluhur* si mati adalah: a) ayah, kakek, dan jalur ke atasnya, b) ibu, nenek dan jalur ke atasnya. Adapun golongan garis lurus kebawah disebut *furu'* atau anak turunan si mati adalah: a) anak laki-laki, cucu, cicit dan jalur kebawahnya. Kemudian golongan garis menyamping disebut *hawasyi* adalah: a) saudara laki-laki dan perempuan secara mutlak, baik saudara kandung maupun seayah atau seibu, b) anak-anak saudara kandung atau seayah dan c) paman sekandung, seayah, dan anak laki-lakinya paman sekandung.⁶⁷

3) Memerdekakan budak (*Al-Wala'*)

Memerdekakan budak yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) . orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu Allah Swt menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris hakiki baik karena ada kekerabatan ataupun tali pernikahan.⁶⁸

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2013, h. 78

⁶⁷ Syamsulbahri Salihima, *op.cit.*, h. 63-65

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 109-110

4) Hubungan keislaman

Hubungan keislaman adalah hubungan keagamaan yakni sama-sama menganut agama Islam, menyebabkan terjadinya saling mewarisi sebagaimana pendapat golongan *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah* bahwa apabila seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka yang menjadi ahli warisnya adalah orang yang seagama Islam.

E. Golongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni ashabul furudh atau dzawil furudh, ashabah, dan dzawil arham.

1. Ashabul furudh

Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, as-sunnah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.⁶⁹

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁷⁰

Ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek (ayah dari ayah)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah

⁶⁹ Madani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 37

⁷⁰ Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Ahyar jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, h. 31

- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah
- l) Anak paman yang seibu seayah
- m) Anak paman yang seayah
- n) Suami
- o) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas semuanya ada maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Anak

Apabila ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah)
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Istri
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang, yaitu:

- 1) anak perempuan
- 2) cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) ibu
- 4) saudara perempuan seayah dan seibu
- 5) istri

Andaikan ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut:

- 1) ayah
- 2) ibu
- 3) anak laki-laki
- 4) anak perempuan
- 5) istri.⁷¹

2. Ashabah

Ashabah merupakan para ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan dari ashhabul furudh.⁷² Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah
- b) Jika ada ahli waris ashhabul furudh maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashhabul furudh tersebut
- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashhabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Yang termasuk ahli waris ashabah yakni sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan)
- 9) Paman kandung
- 10) Paman seayah
- 11) Anak laki-laki paman sekandung

⁷¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 63-64

⁷² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, h. 607

12) Anak laki-laki paman seapak

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Ashabah binnafsih (dengan sendirinya) yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain.
- b) Ashabah bilghairi (bersama orang lain) yaitu orang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya.
- c) Ashabah ma'al ghairi (karena orang lain) yaitu orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah.

3. Dzawil arham

Dzawil arham adalah anggota kerabat simati yang tidak termasuk ashabul furudh dan tidak pula ashabah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.⁷³ Yaitu sebagai berikut:

- a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c) Kakek (bapak dari ibu)
- d) Nenek (ibu kakek)
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu)
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- g) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)
- h) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k) Anak perempuan dari paman
- l) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).⁷⁴

F. Anak Angkat dalam Hukum Islam

⁷³ A Turmudi, *Fiqih Waris di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h.

⁷⁴ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *op.cit.*, h. 67

Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala kecil. Meskipun demikian Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam.⁷⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷⁶

Adopsi anak sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah sebelum ada risalah Nabi Muhammad Saw. Dahulu anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya, boleh menerima waris, dapat menyendiri dengan anak serta istrinya, dan istri anak angkat haram bagi ayah angkatnya. Secara umum anak angkat layaknya anak kandung didalam segala urusan.⁷⁷

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, berdasarkan firman Allah Swt QS.Al-Ahzab: 5

⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1995 h. 14

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nusa Aulia, 2013, h. 52

⁷⁷ Bachtiar Nasir, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Jakarta: Gema Insani, 2012, h. 4111

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, Maha Penyayang.”⁷⁸

Imam Ibnu Katsir berkata, Ayat ini berisi perintah Allah Swt yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah Swt memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah”.⁷⁹

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.
3. Anak angkat bukanlah *mahram*. Sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab

⁷⁸ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 418

⁷⁹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, h. 304

yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan *mahram*.

4. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah. Sebagaimana Firman Allah SWT QS.Al-Ahzaab: 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”⁸⁰.

G. Pendapat Ulama tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan, Wasiat dan Hibah.

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena

⁸⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 423

hubungan kekerabatan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah *al-mushaharah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori diatas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal selama hidupnya.⁸¹

Bicara masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang membolehkannya, namun alangkah baiknya anak angkat tetaplah diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya, yakni dengan jalan memberinya wasiat.⁸²

Menyangkut pemberian harta kepada anak angkat mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

⁸¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 25

⁸² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 348

- (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸³

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.⁸⁴

Hukum Islam mengatur pula tentang adanya hibah, yakni penghibah adalah orang yang berumur 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah dilaksanakan, obyek hibahnya harus punya si pemberi hibah, sesuatu yang kepemilikannya dihalalkan dalam agama dan disertai *Ijab* dan *Qabul* untuk syarat dan sahnya hibah.⁸⁵

Ulama Mazhab Hanafi melarang dengan tegas seseorang yang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dalam

⁸³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 62

⁸⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op.cit.*, h. 80

⁸⁵ Mahdiah, *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, h. 66

hal kebaikan. Mereka beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh yang harus dibatasi segala tindakannya.⁸⁶

Akan menjadi permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akan di berikan kepada anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi dari 1/3 harta keseluruhan yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat di bedakan menjadi dua hal yakni, jika hibah tersebut di berikan kepada orang lain (bukan seorang ahli waris ataupun badan hukum) maka mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakan hal tersebut perlu di batasi, tetapi jika hibah tersebut di berikan kepada anak-anak atau ahli waris dari pemberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqoha amsar menyatakan hal tersebut makruh.⁸⁷

Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian atau pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal dengant hibah atau wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisannya karena untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Adapun perbedaan antara waris, hibah dan wasiat yaitu:

	WARIS	HIBAH	WASIAT
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat

⁸⁶ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, 1995, h. 445

⁸⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 128

Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayit, sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan sewaktu si mayit juga masih hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak dibatasi, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Hibah dan wasiat (selain wasiat untuk ahli waris sendiri) tidak perlu izin ahli waris. Ini sudah jelas, sebab sebelum seseorang meninggal dunia, sebenarnya belum ada istilah ‘ahli waris’ atau ‘harta waris’.⁸⁸

⁸⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 130-131

BAB III

DESKRIPTIF PELAKSAANAAN HARTA BENDA KEPADA ANAK

ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO

KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Desa pandanarum adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tirto Pekalongan Jawa Tengah Indonesia. Desa pandanarum terdiri atas tiga Rukun Warga (RW) dan dua belas Rukun Tetangga (RT), yang mana setiap rukun tetangga terdiri atas beberapa pedukuhan. Sebagian besar Desa Pandanarum dikelilingi oleh sawah, di desa ini juga terdapat makam waliyullah yang bernama Mbah Wali Wono Segoro yang terletak di dukuh bentaro, dimana setiap tanggal 1 Muharom (Tahun Baru Hijriyah) diperingati khoul untuk mengenang jasa-jasa beliau.

1) Daftar pedukuhan di Desa Pandanarum

- a. Pacing kidul (meliputi Rukun Tetangga 1, 2, dan 3)
- b. Pacing tengah (meliputi Rukun Tetangga 4 dan 5)
- c. Cileduk (meliputi Rukun Tetangga 6)
- d. Pacing lor (meliputi Rukun Tetangga 7)
- e. Bentaro (meliputi Rukun Tetangga 8)
- f. Kepuh (meliputi Rukun Tetangga 9)
- g. Kepuh tengah (meliputi Rukun Tetangga 10)
- h. Kepuh lor (meliputi Rukun Tetangga 11)
- i. Kepuh kembangan (meliputi Rukun Tetangga 12)

2) Letak geografis

- a. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karanganyar
- b. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Curug

- c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paweden dan Desa Coprayan
- d. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngalian

3) Mata pencaharian masyarakat

- a. Petani
- b. Buruh
- c. Tukan jahit
- d. Montir
- e. Pengrajin
- f. Peternak
- g. Pengusaha
- h. PNS
- i. Pensiunan
- j. Pegawai swasta
- k. Pedagang

4) Sarana pendidikan

- a. Agama
 - TPA Roudhotul ‘Athfal
 - MDA Roudhotul ‘Athfal
 - TK Baca Al-Ikhsan
 - TPQ Al-Ikhsan
 - MDA Al-Ikhsan
- b. Umum
 - RA Muslimat Nu
 - MIS Pandanarum
 - SD Negeri Pandanarum⁸⁹

B. Praktek Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu,

⁸⁹ Data monografi Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Desember 2016, h. 1

profil responden akan menjelaskan tentang identitas dari para pelaku pelaksanaan harta benda tersebut yakni pihak pemerintahan desa, ahli waris, dan anak angkat dengan keterangan sebagai berikut:

1. Munariyah

Munariyah adalah seorang perempuan yang menjabat sebagai Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Beliau berusia 42 tahun. Beliau merupakan orang yang selalu membantu dalam menyelesaikan sengketa terhadap masyarakatnya dan salah satu orang yang berperan penting dalam permasalahan yang penulis teliti tentang pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang berada di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.⁹⁰

2. KH. Nasrurrahman Al-Khafid

KH. Nasrurrahman Al-Khafid adalah seorang tokoh ulama yang berada di Desa Banyurip Ageng Kota Pekalongan. Masyarakat sering memanggilnya yaitu Kyai Annas. Saat ini usia beliau 68 tahun. Beliau bekerja sebagai guru ngaji di Desa Banyurip Ageng. Beliau termasuk orang yang membantu menyelesaikan masalah tentang harta benda yang ditinggalkan oleh H. Darsan dan Hj. Temuwiyah.⁹¹

3. Madenur

Madenur adalah seorang laki-laki asli Desa Pandanarum yang berusia 64 tahun. Rumahnya dekat sekali dengan H. Darsan dan Hj. Temuwiyah. Beliau termasuk anak dari Napsiyah (saudara kandung

⁹⁰ Ibu Munariyah, wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016

⁹¹ KH Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016

dari Ibu Hj. Temuwiyah yang sudah meninggal). Pekerjaan beliau adalah pedagang ayam di pasar. Beliau termasuk perwakilan dari keluarga Hj. Napsiyah yang mendapatkan harta benda dari Hj. Temuwiyah.⁹²

4. Agus Subandrio

Agus Subandrio adalah seorang laki-laki asli Desa Pandanarum yang berusia 56 tahun. Beliau termasuk anak dari H. Muzrab (saudara kandung Ibu Hj. Temuwiyah yang sudah meninggal). Pekerjaan beliau adalah serabutan. Beliau termasuk perwakilan dari keluarga H. Muzrab yang mendapatkan harta benda dari Hj. Temuwiyah.⁹³

5. H. Basari

H. Basari adalah seorang laki-laki asli Desa Pandanarum yang berusia 82 tahun. Beliau merupakan saudara kandung tertua yang masih hidup dari Hj. Temuwiyah. Pekerjaan sehari-harinya adalah petani dengan menggarap sawah yang dimilikinya. Walaupun usia beliau sudah tua tetapi beliau masih mempunyai semangat kerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁹⁴

6. H. Abdullah

H. Abdullah adalah seorang laki-laki asli Desa Banyurip Kota Pekalongan yang berusia 77 tahun. Beliau merupakan saudara kandung Hj. Temuwiyah yang bertempat tinggal paling jauh dari saudara yang

⁹² Madenur, Wawancara, Pekalongan, 29 Desember 2017

⁹³ Agus Subandrio, Wawancara, Pekalongan, 29 November 2016

⁹⁴ H. Basari, Wawancara, Pekalongan, 29 November 2016

lainnya. Saat ini beliau sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya karena sering masuk keluar rumah sakit.⁹⁵

7. Hj. Masithoh

Hj. Masithoh adalah istri dari H. Khasanuri (saudara kandung Ibu Hj. Temuwiyah). Beliau tinggal di Desa Jenggot Kota Pekalongan. Setelah ditinggal oleh suaminya beliau bekerja sebagai pedagang batik yang ada di Pekalongan. Beliau termasuk keluarga H. Khasanuri yang mendapatkan harta benda dari Hj. Temuwiyah⁹⁶

8. Hj. Sa'diyah

Hj. Sa'diyah adalah seorang perempuan asli Desa Pandanarum yang berusia 70 tahun. Beliau merupakan salah satu saudara perempuan dari Ibu Hj. Temuwiyah yang masih hidup. Beliau juga tinggal berdekatan dengan H. Basari dan Agus Subandrio. Sekarang ini Ibu Hj. Sa'diyah tidak bekerja karena kondisi dan usia beliau sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktifitas seperti biasanya.⁹⁷

9. Danumi

Danumi adalah anak angkat dari Keluarga H. Darsan dan Hj. Temuwiyah. Usia beliau saat ini 63 tahun. Beliau diangkat oleh keluarga tersebut sejak berusia 11 bulan. Sekarang ini beliau tinggal di Desa Pandanarum. Beliau bekerja sebagai pedagang makanan meneruskan pekerjaan Ibu angkatnya yakni Hj. Temuwiyah.

⁹⁵ H. Abdullah, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016

⁹⁶ Hj. Masithoh, Wawancara, Pekalongan, 29 Januari 2017

⁹⁷ Hj. Sa'diyah, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016

Sebelum diangkat oleh H.Darsan dan Hj. Temuwiyah, Danumi adalah anak kandung dari Siti yang tinggal di Desa Banyurip Ageng Kota Pekalongan. Keluarga kandungnya memberikan anak tersebut kepada H.Darsan dan Hj.Temuwiyah karena faktor ekonomi yang sedang dihadapi pada waktu itu.

Praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan suatu kasus yang baru dan bisa dibilang unik. Keunikan tersebut terletak pada pelaksanaannya yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

H. Darsan meninggal dunia pada tahun 2007, sejak meninggalnya H.Darsan tidak ada pembagian harta benda yang ditinggalkannya karena Hj.Temuwiyah (istri H.Darsan) masih hidup, tidak lama kemudian Hj. Temuwiyah meninggal dunia pada tahun 2012. Keluarga tersebut meninggalkan harta benda, ahli waris dan anak angkatnya. Harta benda yang ditinggalkan berupa harta bawaan dari Hj. Temuwiyah dan harta bersama dari H.Darsan dan Hj. Temuwiyah.

Adapun perincian harta benda yang ditinggalkan oleh H. Darsan dan Hj. Temuwiyah yaitu:⁹⁸

a. Harta Bawaan Hj. Temuwiyah

Harta bawaan Hj. Temuwiyah merupakan harta dari orang tua kandungnya yaitu Wasmun dan Sri'ah. Setelah orang tua kandung Hj.

⁹⁸ Danumi, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember 2016

Temuwiyah meninggal dunia, Hj. Temuwiyah diberi harta berupa Sawah, tanah rumah, dan kebun dengan taksiran harga yang disebutkan pada kolom dibawah ini:

No	Warisan	Nilai
1.	Sawah 500 M ²	Rp.76.000.000,.
2.	Tanah rumah	Rp.150.000.000,.
3.	Kebun 140 M ²	Rp.30.000.000,.
JUMLAH		Rp. 256.000.000,.

b. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari H. Darsan dan Hj. Temuwiyah selama mereka sudah melaksanakan pernikahan. Harta gono-gini berupa sawah dan kebun dengan taksiran harga yang sudah disebutkan pada kolom dibawah ini:

No	Warisan	Nilai
1.	Sawah 1000 M ²	Rp. 152.000.000,.
2.	Kebun 280 M ²	Rp. 60.000.0000,.
JUMLAH		Rp. 212.000.000,.

Pada tahun 2012 ahli waris mencoba membagikan harta benda secara kekeluargaan, namun hasilnya belum juga bisa dibagikan karena banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh ahli waris yang bersangkutan salah satunya adalah saudara Hj. Temuwiyah saling

memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh H.Darsan dan Hj. Temuwiyah dengan alasan H.Darsan dan Hj. Temuwiyah tidak mempunyai anak kandung yang bisa mewarisi harta peninggalannya. Danumi sebagai anak angkat dari H. Darsan dan Hj. Temuwiyah keberatan dengan keinginan dari saudara Hj. Temuwiyah tidak terima atas permintaan itu karena dari kecil sampai keluarga angkatnya meninggal dunia Danumi seorang diri yang sudah merawatnya seperti keluarga kandungnya.

Pada tahun 2013 H. Basari sebagai saudara yang paling tertua dari Hj. Temuwiyah meminta Kepala Desa Pandanarum dan Kyai Annas untuk membantu membagikan harta yang di tinggalkan oleh H. Darsan dan Hj. Temuwiyah karena sudah hampir satu tahun setelah ditinggalkan oleh pewaris semua harta waris yang ditinggalkan tidak terurus dan banyak tanggapan negatif dari kalangan masyarakat karena sebagian keluarga yang sudah bergelar Haji masih tetap saja merebutkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Pembagian harta benda dilaksanakan di kantor Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang disaksikan oleh Kepala Desa, Kyai Annas, H. Basari, H. Abdullah dan Hj. Sa'diyah dan Danumi. Sebelum pelaksanaan harta benda Kyai Annas memastikan ahli waris yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Ahli waris yang disebutkan oleh Kyai Annas yaitu saudara dari Hj. Temuwiyah yaitu Napsiyah, H. Musrab,

H. Ghozin, H. Basari, H. Abdullah, H. Khasanuri, Hj. Sa'diyah dan tidak lupa anak angkat dari H.Darsan dan Hj. Temuwiyah yaitu Danumi.

Hasil dari pembagian harta benda tersebut yaitu harta bawaan dari Hj. Temuwiyah diberikan kepada saudara Hj. Temuwiyah yang masih hidup yaitu: Madenur, Agus Subandrio, H. Basari, Hj. Masyitoh, H. Abdullah dan Hj. Sa'diyah. Adapun harta bersama H. Darsan dan Hj. Temuwiyah semuanya diberikan kepada anak angkatnya yaitu Danumi.

Adapun perincian pembagian hartanya adalah sebagai berikut:

a. Pembagian harta bawaan Hj. Temuwiyah

No	Ahli Waris	Nilai
1.	Napsiyah	Rp. 9.000.000,.
2.	H. Musrab	Rp. 9.000.000,.
3.	H. Ghozin	-
4.	H. Basari	Rp. 91.600.000,.
5.	H. Abdullah	Rp. 91.600.000,.
6.	H. Khasanuri	Rp. 9.000.000,.
7.	Hj. Sa'diyah	Rp. 45.800.000,.
JUMLAH		Rp. 256.000.000

Dari pembagian harta bawaan yang sudah dijelaskan diatas, Napsiyah, H. Musrab, dan H. Khasanuri hanya mendapatkan dengan taksiran harga Rp. 9.000.000 yang berbentuk kebun pemberian ini

menyebutnya pemberian secara Cuma-cuma dengan alasan mereka sudah meninggal dan harta tersebut diserahkan kepada perwakilan dari keluarga masing-masingnya.

Adapun perolehan H. Basari, H. Abdullah adalah sama yaitu dengan taksiran harga Rp. 91.600.000 dan Hj. Sa'diyah dengan taksiran harga yaitu Rp. 45.800.000., (tanah rumah dan sawah) karena sisa dari pembagian saudaranya yang sudah meninggal dihitung dengan cara 2:1 untuk H. Basari, H. Abdullah dan Hj. Sa'diyah. Disamping itu H. Ghozin tidak dapat harta warisan karena sudah meninggal dan tidak memiliki saudara.

b. Harta bersama

No	Warisan	Nilai
1.	Sawah 1000 M ²	Rp. 152.000.000,.
2.	Kebun 280 M ²	Rp. 60.000.0000,.
JUMLAH		Rp. 212.000.000,.

Harta bersama diberikan kepada anak angkat H. Darsan dan Hj. Temuwiyah dengan jumlah taksiran harga yaitu Rp. 212.000.000. Hasil pembagian ini Danumi mendapatkan harta benda dan mendapat bagian yang lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.⁹⁹

⁹⁹ Danumi, Wawancara, Pekalongan, 10 Desember, 2016

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan kasus dari keluarga di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan antara lain:

1) Masalah perekonomian

Perekonomian menjadi faktor utama yang menjadi terlaksananya harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sebab sebelum H. Darsan dan Hj. Temuwiyah mengangkat Danumi, perekonomian keluarga Danumi sangat lemah sehingga orang tua kandung dari Danumi menitipkan anaknya kepada H. Darsan dan Hj. Temuwiyah agar Danumi mempunyai kehidupan yang layak hingga dewasa.

2) Belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu) dan ucapan terima kasih dari ahli waris kepada anak angkat atas kesediaannya dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri.

3) Mempererat hubungan kekeluargaan

Disini akan mendapat misi untuk mempererat pertalian keluarga dengan ahli waris dan anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena

berbagai macam latarbelakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga antara ahli waris dan anak angkat yang ditinggalkan H. Darsan dan Hj. Temuwiyah.

Dari faktor-faktor yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang terjadinya pelaksanaan harta benda kepada anak angkat adalah masalah perekonomian, belas kasihan, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dengan demikianlah pelaksanaan harta benda kepada anak angkat merupakan sesuatu bernilai positif.¹⁰⁰

¹⁰⁰ KH Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HARTA BENDA KEPADA

ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO

KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Praktek Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat Di

Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Dalam praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan cara pelaksanaannya dipimpin oleh salah satu tokoh agama masyarakat bahwa hasil pelaksanaan harta bendanya yaitu anak angkat yang mendapatkan harta bersama sedangkan ahli waris mendapat harta bawaan dari pewarisnya.¹⁰¹

Proses pelaksanaan harta dalam kasus ini yaitu sebelum dibagikan seluruh harta yang ditinggalkan dikumpulkan menjadi satu, kemudian setelah menentukan ahli warisnya harta tersebut dipisah antara harta bawaan dan harta bersama.

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan antara anak angkat dan ahli waris. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan hukum Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar

¹⁰¹ KH Nasrurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016

pengertian tersebut diatas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian harta dalam hukum Islam.¹⁰²

Dalam praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat ini juga pendapatannya lebih besar dari ahli warisnya, namun apabila dilakukan dengan cara musyawarah maka akan menimbulkan hal-hal yang positif bagi keluarga dan begitu juga manfaat yang didapat setelah mendapat harta.¹⁰³

Atas dasar kesepakatan dan musyawarah ini sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹⁰⁴

Penulis menganalisis dari praktek pelaksanaan harta benda yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bahwa pembagian harta benda berupa harta bersama yang diberikan kepada anak angkat yang pemberiannya melebihi batas maksimal dan harta bawaan yang diberikan kepada ahli warisnya. Berdasarkan Firman Allah Swt QS. Al-Ahzab: 6

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴿٦﴾

Artinya: “.....dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah daripada orang-

¹⁰² M Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung: Diponegoro, 2013, h. 78

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Grup, 1999, h. 283

¹⁰⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, h. 55

orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)”....¹⁰⁵

Dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan pembagian warisan agar diusahakan yang lebih dekat dengan pewaris. Namun demikian, Allah Swt tetap menganurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama mukmin dan muhajirin dengan cara memberikan sebagian harta benda mereka, antara lain melalui wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh dari sepertiga harta.¹⁰⁶

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat ini disebabkan karena:¹⁰⁷

1. Masalah perekonomian
2. Belas kasihan, karena anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua dan keluarga
3. Mempererat hubungan kekeluargaan.

Analisis terhadap faktor-faktor yang terjadi pada kasus diatas adalah mereka melaksanakan dengan cara musyawarah yang menjadi kesepakatan seluruh ahli waris dengan pelaksanaan harta benda tersebut akan menghasilkan kerukunan keluarga antar ahli waris.

¹⁰⁵ Departemen Agama Ri, op.cit., h. 418

¹⁰⁶ Syamsulbahri Salihima, op.cit, h. 36

¹⁰⁷ KH Nasurrahman A-Khafid, Wawancara, Pekalongan, 30 Desember 2016

Dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor diatas memiliki kesinkronan asas-asas hukum waris adat yaitu:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu kesadaran bagi para ahli waris bahwa rejeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan berebut harta.

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan.

c. Asas kerukunan keluarga

Asas kerukunan dan keluarga yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara kerukunan hubungan keluarga yang damai dan tentram, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas musyawarah mufakat

Asas musyawarah mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan benar yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris

e. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.¹⁰⁸

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi pada keluarga Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 8-9

Berdasarkan isi bunyi pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaiknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.¹⁰⁹

Penerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat.¹¹⁰ Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS.Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:“diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.¹¹¹

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris (pembagian harta warisan). Dan ketika turun ayat faraidh, ayat wasiat itu dinasakh dan pembagian waris yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah Swt yang harus diberikan kepada

¹⁰⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, h. 148

¹¹⁰ Achmad Zainudin dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, h. 297-322

¹¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h 27

ahli waris tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat.¹¹²

Dan dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *sunan* dan lain-lain dari Amr bin Kharijah.

أخبرنا أبو علي الروذباري، حدّثنا أبو بكر بن داسة، حدّثنا أبو داود، حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدّ ثنا ابن عياش، عن شر حبيب بن مسلم، قال سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله عليه وسلّم يقول : إنّ الله جل ثناؤه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثه.¹¹³

Artinya: “telah mengabarkan kepadaku Abu Ali Ar-Raudzibari, telah bercerita kepadaku Abu Daud, telah bercerita kepadaku Abdul Wahab bin Najdah, telah bercerita kepadaku Ibnu Abbas dari Syar Hubail bin Muslim, berkata aku telah mendengarkan Abu Umamah berkata: bahwa aku telah mendengarkan Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris”

Dengan demikian kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah di nasakh. Hal ini termasuk ijtihad semua ulama bahkan terlarang berwasiat kepada mereka dengan dalil hadis terdahulu dari Amr bin Kharijah.¹¹⁴

Kemudian mengenai kepemilikan harta peninggalan untuk anak angkat dalam hukum Islam tidak mengatur aturan akan tetapi Kompilasi Hukum Islam sebagai perombak untuk kemaslahatan telah menguraikan secara rinci menurut ketentuan bagian-bagiannya, baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris. Pembagian harta yang tidak terselesaikan dalam keharmonisan keluarga kadangkala memacu permasalahan yang mengarah

¹¹² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, h. 429

¹¹³ Al-Imam Abi Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn Ali Baihaqi, *Sunan Kubro Juz 6*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt, h. 432

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 369

ke perselisihan dan sebagai penyelesaiannya biasanya menggunakan badan kelembagaan seperti pengadilan. Perselisihan yang berujung permusuhan bukan ajaran yang diajarkan oleh syari'at Islam, akan tetapi bagaimana permasalahan tersebut mampu terpecahkan dengan musyawarah mufakat tanpa melibatkan pihak luar.

Permasalahan yang dihadapi mengenai pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang menimbang cenderung bagian lebih banyak ini mempunyai alasan sebagaimana faktor ekonomi anak angkat, belas kasihan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Setiap ahli waris telah ditetapkan bagiannya masing-masing, akan tetapi jika pembagiannya tidak sesuai dengan hukum kewarisan maka akan menimbulkan persoalan. Menurut penulis pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak sepenuhnya dilakukan. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa selain *Furudhul Muqaddarah* tidak berhak memperoleh harta peninggalan. Karena hal ini bisa menjadi kekecewaan dilingkungan keluarga ahli waris, seharusnya pelaksanaan harta benda itu dilakukan menurut ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Kasus Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat

a. Kasus pemberian harta benda kepada ahli waris

H. Darsan dan Hj. Temuwiyah meninggalkan harta benda berupa harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan dari Hj. Temuwiyah

berupa sawah 500 M² dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000, tanah rumah dengan taksiran harga sejumlah Rp. 150.000.000 dan kebun 140 M² dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari keseluruhan harta bawaan dari Hj.Temuwiyah yaitu berjumlah Rp. 256.000.000 dan harta bersama dari H.Darsan dan Hj.Temuwiyah berupa sawah 1000 M² dengan taksiran harga berjumlah Rp. 152.000.000 dan kebun 280 M² dengan taksiran harga berjumlah Rp. 60.000.000 dari keseluruhan harta bersama tersebut berjumlah Rp.212.000.000. dari peninggalan harta tersebut ahli waris mendapatkan harta bawaan dari Hj. Temuwiyah.

Dalam hukum kewarisan Islam bagian untuk ahli waris pada kasus tersebut. Cara pembagian hartanya menggunakan teori *Ashabah bi al-ghair* yang berarti (bersama orang lain) yaitu orang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya.¹¹⁵

No	Ahli Waris	Bagian	Jumlah
1.	H. Muzrab	2/12x256.000.000	Rp.42.666.666
2.	H. Ghozin	2/12x256.000.000	Rp.42.666.666
3.	H. Basari	2/12x256.000.000	Rp.42.666.666
4.	H. Abdullah	2/12x256.000.000	Rp.42.666.666
5.	H. Khasanuri	2/12x256.000.000	Rp.42.666.666
6.	Hj. Sa'diyah	1/12x256.000.000	Rp.21.333.333
7.	Napsiyah	1/12x256.000.000	Rp.21.333.333

¹¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 168

b. Kasus perolehan harta benda kepada anak angkat

H. Darsan dan Hj. Temuwiyah mengangkat Danumi. Harta benda yang ditinggalkan harta bawaan dari Hj.Temuwiyah berupa sawah 500 M² dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000, tanah rumah dengan taksiran harga sejumlah Rp. 150.000.000 dan kebun 140 M² dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari keseluruhan harta bawaan dari Hj.Temuwiyah yaitu berjumlah Rp. 256.000.000 dan harta bersama dari H.Darsan dan Hj.Temuwiyah berupa sawah 1000 M² dengan taksiran harga berjumlah Rp. 152.000.000 dan kebun 280 M² dengan taksiran harga berjumlah Rp. 60.000.000 dari keseluruhan harta bersama tersebut berjumlah Rp.212.000.000. Dari peninggalan harta tersebut anak angkat memperoleh seluruh harta bersama yang jumlahnya Rp. 212.000.000,.

Dalam hukum Islam anak angkat memperoleh 1/3 dari harta yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000. Menurut penulis setiap bagian sudah ditetapkan bagiannya. Karena jumbuh ulama berpendapat bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dengan dalil sabda Rasulullah Saw saat ketika ia berwasiat.¹¹⁶

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ، لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرًا))¹¹⁷

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 371

¹¹⁷ Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt, h. 255

Artinya: Telah bercerita kepadaku Qutaibah bin Said, telah bercerita kepadaku Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a berkata: semoga orang-orang mau mengurangi sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga saja, sebab sepertiga itu sudah banyak.” (HR. Al-Bukhari).

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat yang terjadi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku karena anak angkat dalam hukum Islam hanya bisa mendapatkan harta yang di tinggalkan dengan jalan wasiat wajibah dan bagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan pewaris karena ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan cara pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut penulis tindakan seperti ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا¹¹⁸

Artinya: “ada atau tidak adanya hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya illat hukum tersebut.

Kaidah ushul fiqh tersebut menerangkan bahwa alasan itu sangat mempengaruhi hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan sebagai suatu pernyataan yang secara tekstual sudah tercantum dalam Al-Qur’an merupakan suatu hal yang universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat Islam melakukan peraturan syari’at yang ditunjuk oleh

¹¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili Damasyqi, *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*, Damasyqi: Al-Mathba’at al-‘ilmiyyat, 1969, h. 415

nash-nash yang shorih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun adalah suatu keharusan selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil-dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.¹¹⁹ Namun demikian, kenyataan dalam masyarakat ternyata masyarakat muslim tidak semuanya menjalankan ketentuan waris sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an karena adanya alasan-alasan tertentu yang mendasarinya seperti menjaga kerukunan antar pewaris sehingga pembagiannya menyimpang Al-Quran.

¹¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, h. 34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah harta bawaan diberikan kepada ahli waris dan harta bersama diberikan kepada anak angkat dalam pelaksanaannya melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh hukum Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan karena tiga faktor yaitu masalah perekonomian, belas kasihan dan menjaga kerukunan keluarga.
3. Pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas kesepakatan dan musyawarah ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagian”.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan harta benda, setiap ahli waris sudah mengetahui bagan-bagiannya sesuai dengan hukum Islam.
2. Adanya perkembangan hukum Islam yang dikembangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, maka perlu kiranya pelaksanaan harta benda kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Perlu dilakukakannya sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT disampaikan oleh penulis karena dengan karunia, rahmat, hidayah dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata satu meskipun dalam segala keterbatasannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi wacana tambahan keilmua yang ada. Penulis tetap berharap bahwa apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo. 1995.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Aflah, Noor. *Kewarisan Istri Beda Agama*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2014.
- Al-Baihaqi, Al-Imam Abi Bakr Ahmad Ibnu Husain. *Sunan Kubro jilid 6*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhori jilid 3*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Al-Husaini, Taqiyyudin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Ahyar jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu. 1983.
- Ali, Ahmad. *Kitab Shahih, Al-Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Alita Aksara Media. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Al-Munawir, Ahmad Warsom. *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia. 2013.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir jilid 1*. Jakarta : Gema Insani. 2013.
- *Tafsir Al-Munir jilid 2*. Jakarta : Gema Insani. 2013.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Terjemahan Mutiara Hadis Shahih Bukhori Muslim*. Solo: Al Andalus. 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 1990.
- Damasyqi, Wahbah Al-Zuhaili. *Al Wasith Fi Ushul Al Fiqhi*. Damasyqi: Al-Mathba'at Al-'Ilmiyyat. 1969.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti. 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.
- Harahap, Rustam Dahar Apollo. *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang. 2013.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rasdakarya, 2007.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas. 1982.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Madani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2014.

- Mahdiah. *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Nasir, Bachtiar. *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Nasution, Amien Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Nugrahaeni, Destri Budi. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As-Syifa. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara. 2006
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 1994.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Grup. 1999.
- Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.
- Turmudi, A. *Fiqih Waris di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Yahya, M Samhuji. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro. 1988.
- Zainudin, Achmad dan A. Ma'ruf Asrori. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu. 1997.

B. Wawancara

- Wawancara Bapak Agus Subandrio pada tanggal 29 November 2016
- Wawancara Bapak H. Basari pada tanggal 29 November 2016
- Wawancara Ibu Hj. Sa'diyah pada tanggal 10 Desember 2016
- Wawancara Ibu Danumi pada tanggal 10 Desember 2016
- Wawancara Ibu Munariyah pada tanggal 10 Desember 2016
- Wawancara Bapak K.H Nasurrahman Al-Khafid pada tanggal 30 Desember 2016
- Wawancara Bapak Madenur pada tanggal 29 Desember 2016
- Wawancara Ibu Hj. Masithoh pada tanggal 29 Januari 2017

C. Website

- <http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73432/110710101115--HIKMATUL%20MAHFIYYAH-1-74.pdf?sequence=1>
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/953/2/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DP.pdf>
- <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/86/jtptiain-gdl-sitinurazi-4299-1skripsi-p.pdf>

Jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf

203-355-1SM.pdf.

624-1037-1-SM,Pdf.

[http://akbar-iskandar.blogspot.co.id/2011/05/jenis-observasipartisipannon04.html?m=1.](http://akbar-iskandar.blogspot.co.id/2011/05/jenis-observasipartisipannon04.html?m=1)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jainatus Shela Almadia

Tempat/Tanggal lahir : Pekalongan, 13 Januari 1996

Alamat : Desa Pandanarum Rt. 10 Rw.03 No. 35

Kec. Tirto Kab. Pekalongan

No. Hp : 085642917513

Email : jainatus_shela@yahoo.com

Facebook : Shella Shelli

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. Formal

- TK MUSLIMAT PANDANARUM : 2000-2001
- MIS PANDANARUM : 2001-2007
- MTS HIDAYATUL ATHFAL : 2007-2010
- MAS HIDAYATUL ATHFAL : 2010-2013

b. Non Formal

- TPQ AL-IKHSAN PANDANARUM
- MDA AL-IKHSAN PANDANARUM

Semarang, 11 Juli 2017

Jainatus Shela Almadia
132111099